

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Organisasi Nirlaba

Akuntansi sektor publik ialah salah satu sistem yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik (Renyowijoyo, 2013). Akuntansi sektor publik adalah suatu proses indentifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 adalah organisasi yang memperoleh sumber daya dari para penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan dari organisasi tersebut. Menurut (Mashun 2013 : 215) dalam Barbara Amelia (2017) organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan memupuk keuntungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang diberikan oleh organisasi nirlaba.
2. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka laba tersebut dibagikan kepada pendiri organisasi nirlaba tersebut.
3. Tidak kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan

atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya tersebut pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

### **2.1.2 Standar Akuntansi Keuangan**

Laporan keuangan pada umumnya sudah menjadi konsumsi publik untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan pada saat ini sangat beragam sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu menyusun laporan diperlukan standar yang menjadi pedoman untuk menyusun laporan keuangan. Pemakai membutuhkan laporan keuangan yang dapat dicerna dengan baik sehingga tujuan dari pemakai laporan keuangan ialah membandingkan kinerja antar entitas, sehingga keseragaman dalam penyajian laporan keuangan dapat memudahkan pemakai laporan keuangan dalam membaca dan menganalisis.

Sebuah standar dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu agar bisa dipahami oleh pemakainya sama seperti laporan keuangan yang sudah ada pedomannya agar pemakai dapat dengan mudah membaca dan menganalisis laporan keuangan tersebut, dengan standar akuntansi sebagai fungsi acuan menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan antar entitas menjadi sama. Manajemen lebih mudah menyusun laporan keuangan dikarenakan pedoman yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan memberikan cara penyusunan tersebut.

Standar akuntansi berisikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi terdiri dari kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan serta pernyataan akuntansi. Pada kerangka konseptual berisikan tujuan, komponen-komponen laporan, karakteristik kualitatif dan asumsi pelaporan

keuangan. Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi tentang pedoman penyusunan laporan keuangan, pengaturan transaksi atau kejadian, dan komponen tertentu dalam laporan. Pengaturan terkait komponen laporan keuangan yang secara umum berisi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian laporan keuangan dan pengungkapan. Saat ini hanya ada dua standar akuntansi yang banyak dipakai oleh pembuat laporan keuangan dan juga banyak dijadikan referensi atau di adopsi di dunia yaitu (IFRS) *International Financial Reporting Standar* dan (US-GAAP) *Us Generally Accepted Accounting Principles*. IFRS disusun oleh *International Accounting Standar Board* (IASB) sedangkan US-GAAP disusun oleh *Financial Accounting Standar Board* (FASB), perkembangan terakhir menunjukkan keinginan dalam menyusun standar akuntansi yang berkualitas tingkat internasional semakin kuat. Beberapa Negara sudah banyak mengadopsi penuh IFRS untuk dijadikan standar lokal dalam penyusunan laporan keuangan.

Standar akuntansi keuangan merupakan hasil pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, (Hendrawan, 2010) standar akuntansi keuangan berfungsi sebagai konsep standar dan metode dalam praktik akuntansi. Perusahaan serta lingkungan dipastikan setiap aktivitas yang berhubungan akuntansi maka perlakuannya dalam penyusunan laporan keuangan memakai standar akuntansi keuangan.

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri dari 4 standar, sering disebut 4 standar ini sebagai 4 (empat) Pilar Standar Akuntansi, empat pilar tersebut terdiri dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi

Keuangan Syariah (SAK Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) masing-masing standar ini memiliki peran masing-masing sesuai lingkup kebidangannya, memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda baik dari entitas, perlakuan dan cara penggunaannya. Terbentuknya ke 4 (empat) pilah standar akuntansi keuangan diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan pembuat laporan keuangan diiringi oleh perkembangan jaman dan juga tidak melepaskan budaya seperti Standar Akuntansi Keuangan Syariah terbentuk karena sebagian masyarakat Indonesia mempunyai banyak suku, budaya dan keyakinan standar akuntansi di Indonesia dapat menyesuaikan dengan dipadukannya teori, pedoman dan metode akuntansi dengan perlakuan syar'i yang di adopsi dari budaya umat islam di indoonesia.

Indonesia sendiri sudah mempunyai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang merupakan konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan hal ini ditunjukkan bagi pemakai eksternal. Jika ada pertentangan antara kerangka dasar dengan standar akuntansi keuangan maka relatif yang harus di unggulkan ialah kerangka dasar, dikarenakan kerangka dasar ini dimaksudkan akan dijadikan sebagai acuan pengembangan ilmu akuntansi oleh Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan yang akan berguna dimasa mendatang dan dalam rangka peninjauan kembali terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku, dengan banyaknya konflik kasus tersebut akan berkurang dengan berjalannya waktu (IAI) dalam (Meilani T. & Pusung, 2014). Oleh sebab itu banyaknya penyikapan atau perlakuan kepada aktivitas akuntansi memaksa standar itu menjadi harus mengikuti perkembangan jaman dari kerangka dasar.

Laporan merupakan sarana penghubung komunikasi informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar perusahaan Kieso dalam (Hendrawan, 2010). Banyak diketahui laporan keuangan yang sering disajikan ialah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan ekuitas. Selain itu catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan pengungkapan juga merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan. Posisi yang dicatat pada saat melakukan transaksi yang menunjukkan peningkatan indikator saldo normal dari masing-masing akun (Martani, Siregar, Wardhani, Farahmita, & Tanujaya, 2017:61) dari semua pendapat ahli atas laporan keuangan bisa dipahami bahwa laporan keuangan selain menjadi penghubung komunikasi keuangan kepada pihak-pihak luar perusahaan laporan keuangan yang sering dipublikasikan dan dicatat menentukan posisi atau mempengaruhi peningkatan perusahaan baik itu positif atau negatif. (Martani, Siregar, Wardhani, Farahmita, & Tanujaya, 2017:62) laporan posisi keuangan yang sering kali disebut sebagai potret perusahaan merupakan laporan akuntansi yang menjelaskan atau menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir suatu periode. Laporan keuangan merupakan informasi bagi para penggunanya terutama bagi pemilik perusahaan, investor, kreditur, dan juga bagi manajemen perusahaan untuk bahan data pengambilan keputusan-keputusan terkait potret perusahaan dimasa mendatang seperti :

- 1) Kelayakan untuk penambahan investasi untuk perusahaan atau sebaliknya penentuan apakah harus melakukan penarikan investasi.
- 2) Kelayakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan.

Pencacatan laporan keuangan memang sangat penting bagi perusahaan yang membutuhkan suatu data atau bahan yang nantinya akan menentukan potret

perusahaan di periode selanjutnya, laporan keuangan juga praktis digunakan oleh manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan dan juga laporan posisi perusahaan kepada pemilik perusahaan. Fahmi (2013:20-25) laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan posisi atas kondisi keuangan perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Lebih lanjut lagi Munawir (2002) mengatakan laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk dapat memperoleh suatu informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah tercapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan.

Kegunaan laporan posisi keuangan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai resiko-resiko entitas dan arus kas masa depan. Tujuan dari pengguna laporan posisi keuangan dalam menggunakannya adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengevaluasi struktur pendanaan

Dalam hal ini yang dilihat ialah informasi tentang perbandingan suatu sumber pendanaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas.

- 2) Untuk menganalisis likuiditas

Likuiditas ialah seberapa cepat waktu yang akan diperlukan sampai suatu aset dapat terealisasi atau dikonversi menjadi kas, atau sampai liabilitas terbayarkan. Pihak kreditur biasanya tertarik dengan informasi resiko likuiditas jangka pendek yang informasinya dapat digunakan sebagai penilaian kemampuan entitas perusahaan membayar bunga tepat waktu.

- 3) Untuk menilai solvabilitas

Solvabilitas ialah suatu kemampuan entitas membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Entitas yang memiliki rasio utang yang tinggi berarti memiliki

solvabilitas yang relatif rendah dibandingkan entitas dengan rasio utang yang rendah. Jadi entitas dengan solvabilitas yang rendah artinya ia lebih beresiko, karena memerlukan banyak aset untuk membayar utangnya, baik pokok maupun beban bunga.

#### 4) Untuk menilai fleksibilitas keuangan

Likuiditas dan solvabilitas ini yang akan menentukan fleksibilitas keuangan entitas, yaitu untuk mengukur kemampuan entitas dalam mengambil keputusan atau tindakan tertentu sebagai respon terhadap kebutuhan dan peluang yang ada. Entitas dengan tingkat utang yang tinggi lebih tidak fleksibel dibandingkan entitas dengan tingkat utang rendah. Suatu entitas yang memiliki utang yang tinggi terkadang tidak mudah untuk mengalokasikan dana arus kasnya untuk merespon peluang tertentu misalnya peluang berinvestasi, karena arus kas tersebut harus dialokasikan untuk pembayaran utang.

Laporan keuangan dibutuhkan oleh pihak-pihak pengguna sebagai alat yang sangat penting untuk pembaruan komunikasi sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan memperoleh laporan keuangan tersebut untuk membantunya dalam pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Dalam analisis informasi keuangan, setiap aktivitas kegiatan bisnis harus dianalisis secara mendalam baik oleh pihak manajemen perusahaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut (Repi, Mogi-Nangoi, & Wokas, 2015) Secara umum atau secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi keuangan berikut penjelasannya :



### 1) Pengakuan unsur laporan keuangan

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang nantinya akan memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau dalam laba rugi. Pengakuan tersebut dinyatakan dengan kata-kata atau dengan jumlah uang (nominal) dan mencantumkan kedalam neraca atau laporan laba rugi.

Pos yang memenuhi definisi suatu unsur akan diakui jika :

- a. Ada kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam perusahaan.
- b. Pos tersebut mempunyai nilai biaya yang bisa diukur dengan handal.

### 2) Definisi elemen serta pos laporan keuangan

### 3) Pengukuran unsur dari laporan keuangan

Pengukuran ialah proses penetapan nilai jumlah uang untuk mengetahui setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi. Proses tersebut terkait dengan dasar pemilihan tertentu.

### 4) Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan

Sedangkan menurut Belkaoui dalam Novrina (2014) standar akuntansi diterbitkan atau dikeluarkan karena :

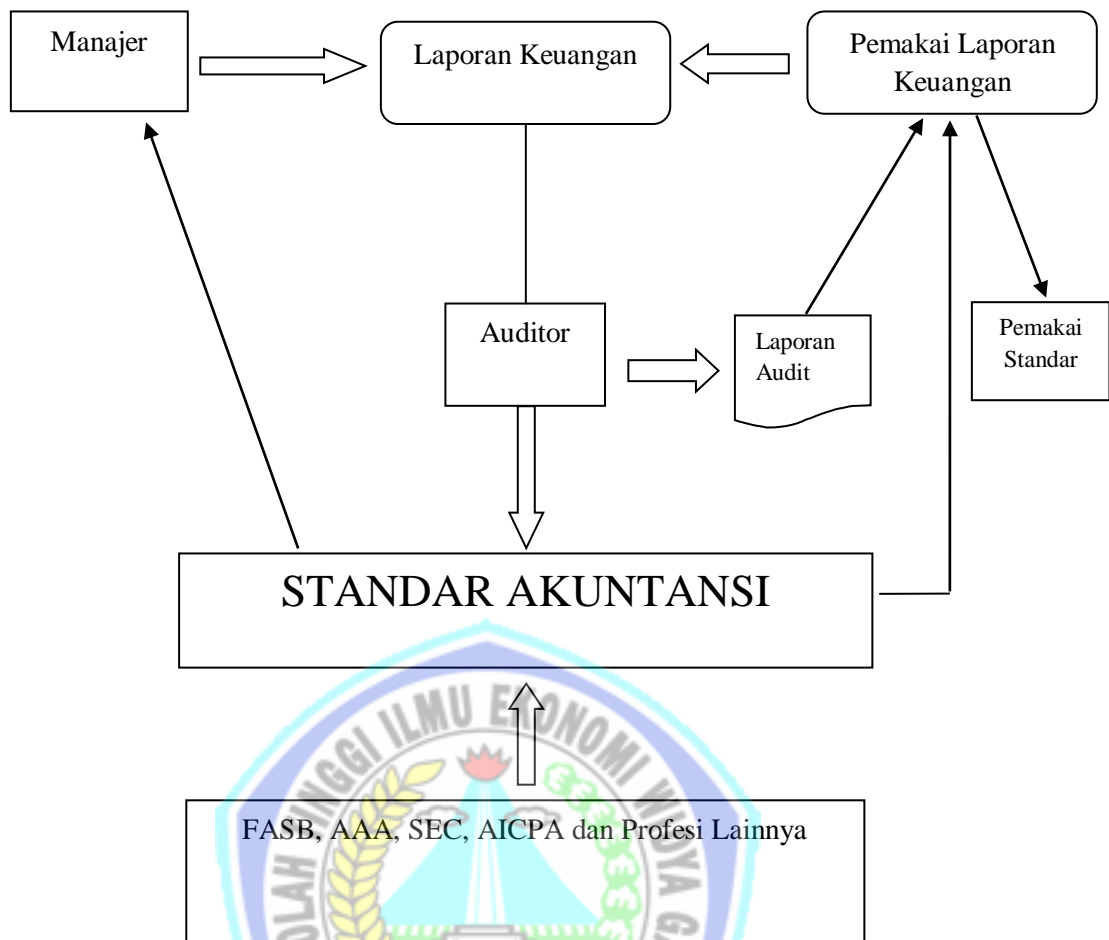
1. Melengkapi pemakaian informasi akuntansi dengan informasi tentang posisi keuangan, prestasi dan pelaksanaan dari suatu perusahaan. Informasi sudah dianggap jelas, konsisten, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan.
2. Melengkapi para akuntan publik dengan pedoman dan aturan-aturan tindakan agar dapat memudahkan mereka dalam menjalankan ketelitian



keabsahan dalam menjual keahliannya dan integritas laporan-laporan kantor akuntan dalam membuktikan keabsahan laporan keuangan ini.

3. Menyediakan pemerintah sebagai sumber data untuk penggunaan berbagai variable dianggap esensial untuk menjalankan program perpajakan, pengaturan perusahaan, dan perencanaan serta pengaturan ekonomi, peningkatan efisiensi ekonomi, dan beberapa sasaran lainnya.
4. Membangkitkan minat terhadap prinsip-prinsip dan teori-teori diantara seluruh jajaran yang mempunyai kepentingan dalam disiplin akuntansi maupun sekedar menyebar luaskan standar akuntansi, akan membangkitkan banyak kontroversi dan perdebatan yang positif untuk kemajuan atau perkembangan akuntansi.





Gambar 2.1 Hubungan Standar Akuntansi dengan Pemakai Laporan Keuangan

Sumber : (Ghozali & Chariri, 2015)

### 2.1.3 Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan ini terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasinya IAI (2016:45.1). Entitas nirlaba dalam memperoleh sumber daya ialah dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan kembalian seperti laba atau pemberi tidak mengharapkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan pemberiannya. Sebagai bentuk akibat perlakuan entitas nirlaba, dalam transaksi entitas nirlaba yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis. Namun dalam berbagai praktik entitas nirlaba sering tampil dengan berbagai bentuk, sehingga seringkali sulit dibedakan dengan entitas bisnis. Pada sekian bentuk nirlaba, meskipun tidak adanya kepemilikan entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan pengoperasiannya yaitu dana tersebut dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Entitas nirlaba ini mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Seperti pengguna laporan keuangan memiliki tujuan yang sama dengan entitas bisnis, yaitu untuk menilai : (a) jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya digunakan untuk terus memberikan jasa tersebut : (b) cara manajer perusahaan nirlaba atau umum melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya. Kemampuan entitas nirlaba digunakan untuk memberikan informasi jasa yang telah dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Laporan disajikan secara terpisah antara aset neto yang terpisah maupun yang terikat penggunaannya. Pertanggungjawaban manajer terhadap kemampuannya mengelola sumber daya

entitas nirlaba yang telah diterimanya dari pemberi sumber daya nirlaba yang tidak mengharapkan pembayaran kembali akan disajikan melalui laporan arus kas dan laporan aktivitas. Laporan aktivitas bisa berupa perkembangan perubahan yang terjadi dalam kelompok aset neto. Berikut ini adalah beberapa pengertian menurut pernyataan standar akuntansi keuangan Nomor 45 dalam (Amil, 2017) :

1) Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan pada organisasi nirlaba ini ialah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang dana, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam rangka menilai IAI (2011:45.2)

2) Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai :

- a. Jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya dalam meneruskan jasa tersebut.
- b. Cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban serta aspek-aspek lain dari kinerjanya.

3) Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk juga catatan atas laporan keuangan ialah untuk menyajikan informasi mengenai :

- a. Jumlah keseluruhan dan sifat aset, liabilitas dan aset neto entitas nirlaba.

- b. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang bisa mengubah nilai dan sifat aset neto.
- c. Jenis dan jumlah arus yang masuk dan arus keluar sumber daya dalam tempo satu periode dan hubungan masing-masing dari keduanya.
- d. Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan sumber daya (kas), memperoleh pinjaman dan cara melunasi pinjaman dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya.
- e. Usaha jasa dari entitas nirlaba.

Setiap laporan keuangan menyediakan informasi laporan keuangan yang berbeda, dan informasi dalam laporan keuangan biasanya melengkapi informasi laporan keuangan yang lain IAI (2016 :45.3)

#### 4) Unsur-Unsur Laporan Keuangan Nirlaba

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut pernyataan standar akuntansi keuangan No.45 meliputi :

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.

Tujuan laporan posisi keuangan ialah menyediakan informasi tentang aktiva, kewajiban dan aktiva bersih, serta mengetahui hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan sebagai bentuk kevaliditasannya mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut biasanya disajikan dalam pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki aktiva serupa dalam suatu kelompok yang *relative homogeny* atau sama.

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai tentang masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pemberi sumber daya yang bagi pemberi sumber daya tidak mengharapkan pembayaran kembali yaitu secara permanen dan temporer, berikut penjelasannya :

- 1) Pembatasan permanen ialah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya, seperti pembatasan permanen terhadap aset missal tanah atau karya seni yang diberikan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan untuk digunakan atau dijual. Tetapi organisasi nirlaba tetap diijinkan menggunakan semuanya atau sebagian manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
- 2) Pembatasan temporer ialah pembatasan penggunaan terhadap sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya, agar sumber daya tersebut dapat dipertahankan sampai periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Pembatasan temporer bisa berupa, pembatasan sumber daya berupa aktivitas operasional
- 3) organisasi nirlaba.
- 4) Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi atau penyumbang. Pembatasan pada sumbangan terikat ini bisa bersifat permanen atau temporer.
- 5) Sumbangan tidak terikat ialah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi oleh pemberi sumbangan atau penyumbang untuk tujuan tertentu. Sumbangan tidak terikat umumnya meliputi pendapatan jasa, penjualan barang sumbangan dan deviden atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan penggunaan

sumbangan tidak terikat bisa berasal dari sifat entitas nirlaba. Informasi mengenai batasan tersebut pada umumnya akan dicatat dalam laporan keuangan.

#### 1) Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan pada aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam suatu periode. Tujuan utama daripada laporan aktivitas ialah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang nantinya bisa merubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain dan bagaimana cara penggunaan sumber daya dalam perlakuan berbagai program atau jasa. Informasi dalam pelaporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya bisa membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur dan pihak lain yang nantinya berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam satu periode, menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa dan menilai pelaksanaan pertanggungjawaban manajer dan kinerjanya.

Informasi penyajian jasa laporan keuangan juga harus menyajikan informasi mengenai beban organisasi nirlaba menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi fungsional harapannya agar bermanfaat bagi para penyumbang, kreditur dan pihak-pihak lain yang menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Hubungan antara manajemen organisasi nirlaba dengan penyumbang sumber daya, kreditur dan pihak-pihak lain ialah sebagai bentuk pertanggungjawaban



dari manajer mengenai kinerjanya sedangkan bagi penyumbang sumber daya dapat memahami alur pemakaian jasa atau alur pengeluaran jasa. Disamping itu organisasi nirlaba diharapkan menyajikan beban secara fungsional, untuk menyajikan informasi tambahan mengenai laporan beban menurut sifatnya.

Pada umumnya program pemberian jasa merupakan aktivitas yang biasa dilakukan dalam kegiatan organisasi nirlaba untuk menyediakan barang dan jasa bagi penerima manfaatnya, pelanggan atau anggota yang bertujuan dalam rangka mencapai hasil utama yang dilaksanakan pada berbagai program utama. Pada aktivitas pendukung umumnya meliputi manajemen dan umum pencairan dana, dan pengembangan anggota.

## 2) Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas ialah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang telah terjadi dalam suatu periode. Laporan arus kas digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyumbang sumber daya yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai barang atau jasa yang akan disumbangkan lagi, sedangkan data mengenai pengeluaran kas berfungsi sebagai data yang nantinya yang akan dibaca oleh kreditur dan juga pihak-pihak lain untuk menganalisis hasil kinerja atau hasil aktivitas dalam suatu periode. Penilaian atas kemampuan mengelola organisasi nirlaba menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan organisasi tersebut, yaitu aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK ; Laporan arus kas atau SAK ETAP dengan tambahan berikut ini :

### a. Aktivitas pendanaan

- 1) Penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan kembalian yang penggunaannya akan dibatasi dalam jangka waktu yang panjang.
- 2) Penerimaan kas dari sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya akan dibatasi untuk perolehan, pengembangan dan pemeliharaan aset tetap atau peningkatan dana abadi.
- 3) Bunga dan deviden yang dibatasi penggunaannya dalam jangka waktu yang panjang.
- 4) Aktivitas Operasional

Mencakup penjualan dan pembelian (aktivitas perbelanjaan) atau produksi barang dan jasa, termasuk juga penagihan kepada pelanggan, pembayaran kepada pemasok atau karyawan dan pembayaran item-item lainnya seperti sewa, pajak, dan bunga.

- 5) Aktivitas Investasi

Mencakup perolehan aktiva dan penjualannya dalam jangka panjang untuk berbagai investasi jangka panjang.

- 3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan atau pelengkap laporan keuangan yang dilampirkan bersama-sama dengan laporan keuangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan neraca, perhitungan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan perubahan posisi keuangan.

Biasanya catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut ini  
Widodo dan Kustiawan (2001)

- a. Informasi umum mengenai gambaran lembaga

- b. Kebijakan akuntansi yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
- c. Penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan riancian lebih lanjut perlu disikapi
- d. Kejadian setelah tanggal neraca ditentukan
- e. Informasi tambahan lainnya yang perlu baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Pengukuran pendapatan harus memenuhi 2 (dua) kriteria untuk bisa dicatat dalam laporan keuangan periode tertentu, yaitu :

- a. Dihasilkan untuk pendapatan yang akan dihasilkan, barang dan jasa harus secara penuh diserahkan agar keterbukaan atas aktivitas organisasi nirlaba transparan terhadap semua elemen yang mempunyai kepentingan didalamnya. Bukti hal ini biasanya berupa pengiriman kepada pihak pelanggan.
- b. Direalisasikan, pendapatan direalisasikan ketika kas atau klaim sudah diterima dalam pertukaran dengan barang atau jasa.

Keuangan dalam periode yang bersangkutan dimana manfaat ekonominya akan dikonsumsi atau digunakan. Beban pada setiap periode terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Beban yang dikaitkan dengan pendapatan yang diperoleh dalam periode yang sama dengan pengeluaran.
2. Beban yang dikaitkan dengan periode waktu itu sendiri.

#### 2.1.4 Pencatatan Keuangan Rumah Sakit

Rumah sakit adalah tempat pemeliharaan kesehatan, tempat yang meliputi : *clinics, ambulatory care organizations, continuing-care retiremen communities, healt mantinance organization, home health agencies, hospital, government-owned health care entities, and nursing homes that provide health care*, (Renyowijoyo, 2013:171). Pemelihara kesehatan mungkin digolongkan sebagai entitas non laba, entitas pemerintahan, atau perusahaan bisnis privat yang dimiliki oleh sebagian investor (*pemangku kepentingan, partners*, atau pemilik). Perlu diketahui rumah sakit menerapkan akuntansi tujuannya agar para pemegang kepentingan dapat membaca laporan keuangan, posisi keuangan saat itu. Akuntansi rumah sakit mengikuti *AICPA Aduit dan Accounting Guide : Health Care Organization*. *AICPA audit guide* memberikan arahan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan baik untuk rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit non pemerintahan walaupun ada perbedaan diantaranya keduanya *Beams et al* dalam (Renyowijoyo, 2013:171). Akuntansi dan pelaporan bagi rumah sakit non pemerintahan umumnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama dengan entitas nonlaba lainnya. Namun demikian, rumah sakit mempunyai karakteristik yang khusus dibidangnya, mempunyai sumber-sumber pendapatan yang unik diantaranya seperti pendapatan pasien dan *fee premium*. Dan klasifikasi relatif khusus. Laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan yang disajikan oleh pihak rumah sakit, *balance sheet*, laporan operasional, laporan non-aset, dan yang terakhir laporan arus kas.

### **2.1.5 Dana BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)**

Jaminan sosial adalah sebuah wadah perlindungan bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah untuk resiko-resiko atau peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan Zaini dalam (Mamesah, 2013). Dan juga tujuan pemerintah untuk memberikan pelyanan medis atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya tersebut, serta jaminan sosial diartikan dengan perlindungan sosial yang akan menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak terutama kesehatan.

Di dalam BPJS jaminan sosial dibagi 5 jenis yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kesehatan. Dan penyelenggaraan dibuat dalam 2 program berikut penjelasannya :

1. Program yang diselenggrakan oleh BPJS Kesehatan dengan programnya yang ketentuannya berlaku mulai 1 Januari 2014.
2. Program BPJS yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan programnya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian yang dilaksanakan sejak 1 Juli 2015.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini awalnya masih satu badan hukum yang didalamnya ada 4 (empat) badan usaha milik Negara menjadi satu badan hukum. Perlu diketahui ke empat badan hukum tersebut diantaranya ialah PT. TASPEN, PT. JAMSOSTEK, PT. ASABRI, Dan PT. ASKES. Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial dan kesehatan ini berbentuk asuransi, yang nantinya semua warga Indonesia wajib menjadi anggota. Terdapat 2 kelompok jika mengikuti program ini yaitu untuk masyarakat yang mampu yang bagi masyarakat kurang mampu. Berikut penjelasan tentang 2 kelompok tersebut :

1. PBI (yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan. Yaitu PBI adalah peserta jaminan kesehatan dari golongan fakir miskin yang dana iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebagai program kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang nantinya berhak bantuan dari pemerintah.

2. Bukan PBI Jaminan kesehatan

Pemerintah sangat diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat yang sudah tertulis dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang berbunyi “Pemerintah diupayakan mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”. Pada pasal selanjutnya tertulis pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 beserta penjelasannya, bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan dapat dilakukan serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat, Sulastomo dalam (Hendrawan, 2010) agar penyelenggaraan jaminan kesehatan ini berhasil guna dan berdaya guna, maka pemerintah perlu :

1. Mengatur upaya penyelenggaraan jaminan kesehatan dan sumber daya kesehatan.
2. Membina penyelenggaraan beserta membina sumber daya kesehatan.
3. Mengawasi penyelenggaraan serta sumber daya kesehatan.

4. Aktif menggunakan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraannya.

Penyelenggaraan jaminan kesehatan dimasyarakat sangat diperlukan dalam upaya peningkatan pembangunan dibidang kesehatan. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai fungsi dan tanggung jawab sangat besar untuk keberlangsungan dan penerapan layanan kesehatan bagi msyarakat bisa seimbang. Peran pemerintah dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sangat diperlukan diharapkan pemerintah dalam upaya memberikan layanan gratis tidak sampai salah tujuan. Peran pemerintah juga diperlukan guna berjalannya program tersebut dengan baik. Peran pemerintah tersebut antara lain :

1. Melakukan pengawasan terhadap program yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menyediakan anggaran tambahan untuk iuran, baik untuk iuran penerima bantuan iuran atau pun bisa masyarakat yang lain.
3. Sebagai penentu peserta menerima bantuan iuran.
4. Melakukan persiapan yang diperlukan dalam menentukan siapa nanti yang berhak menerima pengadaan dan pengelolaan sarana penunjang.
5. Mengajukan pemanfaatan/investasi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di daerah terkait.
6. Sarana/usul kebijakan penyelenggara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Adapun tujuan pemerintah ikut serta dalam perannya semata-mata agar masyarakat benar mendapatkan pelayanan kesehatan yang bisa membantu berjalan semua sistem yang sedang berjalan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor



28 Tahun 2014. Tidak hanya itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mempunyai manfaat yang perlu diketahui, berikut penjelasannya :

1. Pelayanan kesehatan di tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialisik mencakup :
  - a. Administrasi pelayanan
  - b. Pelayanan promotif dan preventif
  - c. Pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan konsultasi medis.
  - d. Tindakan medis non spesialisik, baik yang operatif maupun non operatif.
  - e. Pelayanan di segi obat dan bahan medis yang habis pakai.
  - f. Transfusi darah sesuai kebutuhan medis.
  - g. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama.
  - h. Rawat inap tingkat pertama yang sudah sesuai indikasi.
2. Pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup dua aspek antara lain rawat jalan dan rawat inap berikut penjelasannya:
  - a. Rawat jalan yang meliputi :
    - 1) Administrasi pelayanan
    - 2) Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi medis spesialisik oleh dokter spesialis dan sub spesialis.
    - 3) Pelayanan tindakan medis kepada pasien sesuai dengan indikasi medis.
    - 4) Pelayanan obat kesehatan dan bahan medis habis pakai.
    - 5) Pelayanan alat kesehatan implant.

- 6) Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis yang sudah tertera pada peraturan.
  - 7) Rehabilitasi medis.
  - 8) Pelayanan donor darah.
  - 9) Pelayanan kedokteran forensic.
  - 10) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.
- b. Rawat inap yang meliputi :
- 1) Perawatan inap yang non insentif.
  - 2) Perawatan inap yang diruang intensif.
  - 3) Pelayanan kesehatan lain yang diterangkan oleh Menteri.

Meskipun layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersifat komprehensif terutama pada manfaatnya namun masih ada manfaat yang tidak dijamin menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014 meliputi:

1. Realita dilapangan tidak sesuai prosedur.
2. Pelayanan diluar Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Pelayanan bertujuan komestik.
4. *General checkup*, pengobatan alternatif.
5. Pengobatan pasien untuk mendapataka keturunan, pengobatan impotensi.
6. Pelayanan kesehatan pada saat pasca bencana.
7. Pasien bunuh diri/penyakit yang timbul dikarenakan kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri/bunuh diri/narkoba.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti sebelumnya mengangkat beberapa judul yang bertujuan sebagai referensi, penelitian terdahulu membantu peneliti memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Seperti dalam penelitian (Repi, Mogi-Nangoi, & Wokas, 2015) dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pencatatan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ada dua cara. Yang pertama klaim dan yang kedua pengakuan jasa layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya mengenai pencatatan laporan keuangan untuk entitas nirlaba Rumah Wijaya Kusuma Lumajang telah sesuai dengan standar akuntansi namun ada tambahan laporan pada laporan keuangan Rumah Wijaya Kusuma Lumajang yaitu laporan perubahan ekuitas, selainnya telah disajikan sesuai standar. Pada penelitian (Amil, 2017) mendapatkan kesimpulan pada hasil penelitian, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Sinjai telah bekerjasama dengan BPJS dan mekanisme pencatatan dana BPJS ada dua yaitu pertama klaim dan kedua pengakuan jasa layanan BPJS. Rumah Sakit Umum Sinjai telah patuh dalam menyusun laporan keuangan, namun pada laporan keuangan Rumah Sakit Umum Sinjai terdapat penambahan laporan keuangan yaitu perubahan ekuitas, selainnya telah disajikan sesuai dengan standar. Sementara dalam (Hendrawan, 2010), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif hasil penelitian ini RSUD Kota Semarang telah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No. 45 dan ketentuan yang berlaku dari BLU yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK 05/2008 tentang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan BLU dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan anggaran Rumah Sakit BLU. (Repi, Mogi-Nangoi, & Wokas, 2015) menggunakan metode deksriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini STIKES Muhammadiyah Manado belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan nirlab yang terdapat dalam PSAK No. 45 karena untuk penyusunannya STIKES Muhammadiyah hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari pihak yayasan yang bentuknya masih neraca saldo. Dalam (Mamesah, 2013) menggunakan metode deskriptif kualitatif hasil dari penelitiannya, pengelola GMIM Efrata Sentrum belum menerapkan PSAK No.45 dalam penyajian laporan keuangannya, gereja hanya menyajikan laporan keuangan yang berbentuk realisasi dana sesuai pedoman yang di susun oleh Badan Pekerja Majelis Sentrum Sonder belum memiliki kualitas informasi laporan keuangan yang memenuhi syarat dalam penjelasan. Dan juga pada penelitian (Meilani T. & Pusung, 2014) menggunakan metode deskriptif kualitatif hasil penelitiannya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Panti Sosial belum sesuai dengan PSAK No. 45. Laporan keuangan yang ada berupa laporan pengeluaran, laporan realisasi dan laporan posisi kas menurut pemahaman mereka. Panti Sosial tidak menyajikan laporan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (Kristy, 2017) melakukan penelitian yang berjenis studi kasus di Yayasan Bina Bhakti, data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan menggunakan analisis deskriptif dan hasil dari penelitian ini ialah laporan keuangan Yayasan Bina Bhakti berdasarkan pedoman PSAK No. 45 sesuai dengan informasi yang diharapkan.

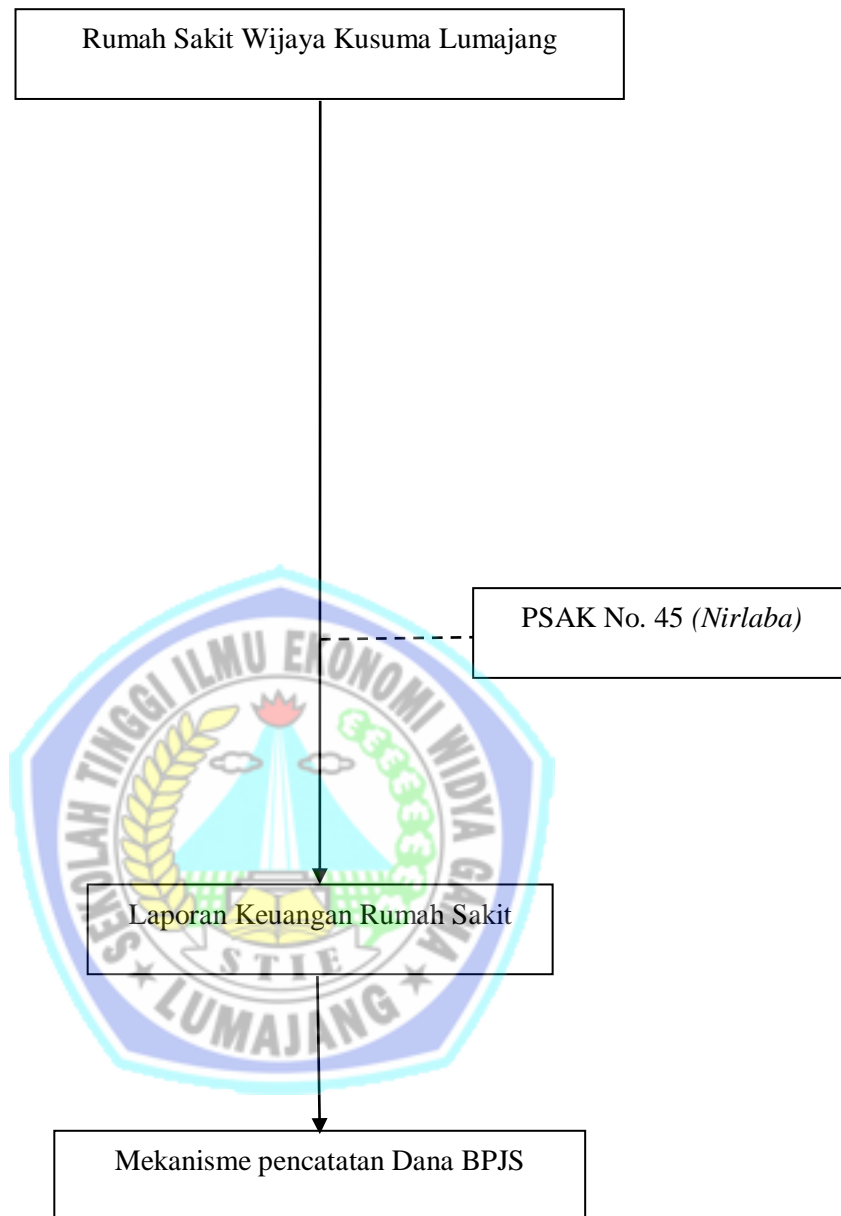
### 2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini menganalisis laporan keuangan Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang, untuk menemukan bagaimana mekanisme pencatatan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan PSAK No. 45 sebagai acuan utama dari penelitian ini. Rumah sakit wijaya kusuma ialah rumah sakit non pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan yang termasuk organisasi nirlaba. Penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba sudah tersusun dan diatur sendiri dalam Standar Akuntansi Keuangan dalam pernyataan PSAK No. 45. Dari uraian ini menjelaskan bahwa laporan keuangan entitas nirlaba jika penyusunannya sudah benar akan menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Untuk menunjang sebuah laporan keuangan maka dibutuhkan pencatatan transaksi yang memadai dan kepatuhan terhadap penerapan standar akuntansi yang berlaku. Sebagaimana dalam teori kepatuhan menjelaskan kepatuhan berasal dari kata patuh, patuh artinya suka menuruti perintah atau disiplin, tunduk pada peraturan. Seorang individu cenderung mematuhi peraturan yang berbentuk hukum yang mengikat mereka dalam beraktivitas sesuai dengan norma-norma internal mereka.

Teori kepatuhan diterapkan di rumah sakit wijaya kusuma lumajang dalam aktivitas melakukan pencatatan laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya aparatur Rumah Sakit Wijaya Kusuma Lumajang pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan rumah sakit wijaya kusuma lumajang dapat tercapai kedisiplinan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan begitu juga pada aktivitas operasional karyawan lainnya. Apabila teori kepatuhan diterapkan maka

akan berimbas positif bagi kualitas pencatatan laporan keuangan. Dengan begitu kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :





Gambar 2.2 Kerangka Pikir

(Sumber: Hasil Olah Data, 2018)